

Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Karang Taruna Kelurahan Balongsari Kota Mojokerto

M. Bahril Ilmiddaviq | Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia

Nur Ainiyah | Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia

Hari Setiono | Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Indonesia

Email korespondensi: daviq@unim.ac.id

Abstrak

Karang Taruna Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto merupakan organisasi kepemudaan yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, olahraga, keagamaan, dan peringatan hari besar nasional di tingkat kelurahan. Pengurus organisasi ini pada umumnya masih mengelola anggaran dan laporan keuangan kegiatan secara sederhana tanpa format baku, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Program Studi Akuntansi menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan bagi pengurus inti Karang Taruna Kelurahan Balongsari. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Juli 2026, pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB, bertempat di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dengan diikuti oleh 10 orang pengurus inti Karang Taruna. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung dan diskusi, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga langsung mempraktikkan penyusunan anggaran dan laporan keuangan kegiatan bersama tim pelaksana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari mampu menyusun RAB kegiatan sesuai format yang diajarkan dan memiliki kemampuan untuk menyusun LPJ kegiatan secara mandiri, termasuk memahami pentingnya kelengkapan bukti pengeluaran sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan serta akuntabilitas pengelolaan dana pada kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang akan datang.

Kata Kunci: *anggaran kegiatan, laporan pertanggungjawaban, akuntabilitas keuangan, Karang Taruna.*

PENDAHULUAN

Karang Taruna merupakan lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan (Kelurahan Jakarta, t.t.; Desa Tusan, 2024). Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna memiliki tugas pokok untuk bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Dinas Sosial Kota Magelang, 2022).

Karang Taruna Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto secara rutin menyelenggarakan kegiatan kepemudaan seperti kegiatan sosial, olahraga, keagamaan, dan peringatan hari besar nasional yang membutuhkan pengelolaan anggaran tersendiri. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal tim pelaksana dengan pengurus Karang Taruna, diketahui bahwa penyusunan anggaran kegiatan selama ini masih dilakukan secara sederhana tanpa format yang baku, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan belum disusun secara tertib serta belum didukung bukti pengeluaran yang lengkap. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan di tingkat organisasi kepemudaan berbasis kelurahan.

Permasalahan yang dihadapi mitra secara khusus meliputi tiga hal, yaitu pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari belum memahami tahapan dan format baku dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, belum memiliki kemampuan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan secara sistematis dan akuntabel, serta belum tersedianya template atau contoh format anggaran dan laporan keuangan kegiatan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari dalam menyusun RAB dan LPJ kegiatan secara mandiri, tertib, dan akuntabel.

Program pengabdian ini diharapkan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan kegiatan bagi mitra, sekaligus menjadi wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat bagi tim pelaksana. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini turut memperkuat kemitraan antara akademisi dengan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, khususnya dalam mendorong tertib administrasi keuangan pada organisasi kepemudaan.

Rencana Anggaran Biaya dalam Pengelolaan Kegiatan Organisasi

Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah dokumen yang memuat estimasi perencanaan biaya sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, yang berfungsi untuk memperkirakan seluruh kebutuhan dana suatu kegiatan (Jurnal.id, 2026a; Jobstreet Indonesia, 2026). RAB umumnya berisi perhitungan biaya mulai dari sewa tempat, peralatan, kepanitiaan, konsumsi, hingga kebutuhan lain yang disusun secara rinci agar mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan (Jurnal.id, 2026a). RAB memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai gambaran awal pengeluaran biaya, patokan penggunaan biaya secara keseluruhan, rujukan transparansi dana, referensi bagi pihak yang mendukung pendanaan, serta penegasan konsep dan kesiapan suatu kegiatan (Jurnal.id, 2026b). Tahapan penyusunan RAB meliputi identifikasi kebutuhan kegiatan, pencatatan harga satuan setiap komponen kebutuhan sesuai kondisi terkini di lapangan, hingga proses rekapitulasi seluruh biaya secara detail (OCBC NISP, 2023). Pada organisasi nirlaba, RAB berperan untuk merencanakan dan mengelola anggaran berbagai kegiatan kemasyarakatan (Jobstreet Indonesia, 2026).

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan

Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ adalah dokumen tertulis yang disusun setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan, berisi laporan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya (Kudkab Empat Lawang, 2026; Talenta, 2026). LPJ menjadi bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar dilaksanakan dan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi unit atau kelompok yang lebih tinggi (Accurate.id, 2025). LPJ berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan, baik pada organisasi pemerintahan, organisasi nirlaba, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya (Talenta, 2026). Dokumen ini umumnya memuat dua bagian utama, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan rangkaian kegiatan

dari awal hingga akhir, serta laporan penggunaan dana yang merinci pemasukan dan pengeluaran beserta bukti pendukungnya (Talenta, 2026; Kudkab Empat Lawang, 2026). Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam penyusunan LPJ, karena kedua prinsip tersebut turut menentukan kualitas laporan keuangan suatu organisasi (Kledo, 2026).

Karang Taruna sebagai Organisasi Kepemudaan

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat (Dinas Sosial Kota Magelang, 2022). Karang Taruna memiliki tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dasar hukum keberadaan Karang Taruna secara nasional tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (Kelurahan Jakarta, t.t.). Sebagai organisasi kepemudaan berbasis wilayah kelurahan, pengurus Karang Taruna dituntut mampu mengelola berbagai sumber daya organisasi secara mandiri, termasuk sumber daya keuangan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan, sehingga penguasaan kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan kegiatan menjadi salah satu kompetensi dasar yang perlu dimiliki pengurus Karang Taruna guna mendukung pengelolaan organisasi yang tertib dan akuntabel.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Juli 2026, pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB, bertempat di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah pengurus inti Karang Taruna Kelurahan Balongsari yang berjumlah 10 orang. Kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Program Studi Akuntansi yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota pelaksana, dan seluruhnya dibiayai secara mandiri oleh tim pelaksana.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan langsung dan diskusi. Metode pendampingan langsung dipilih agar peserta dapat langsung mempraktikkan penyusunan RAB dan LPJ kegiatan dengan arahan tim pelaksana, sedangkan metode diskusi digunakan untuk menggali permasalahan riil yang dihadapi pengurus Karang Taruna dalam pengelolaan keuangan kegiatan selama ini serta memberikan kesempatan tanya jawab secara terbuka.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap. Tahap persiapan, meliputi koordinasi tim pelaksana dengan pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari, penentuan jadwal kegiatan, serta penyusunan materi pelatihan penyusunan RAB dan LPJ. Tahap pelaksanaan, meliputi penyampaian materi, praktik pendampingan langsung penyusunan RAB dan LPJ, serta diskusi tanya jawab bersama peserta. Tahap evaluasi, meliputi pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam menyusun RAB dan LPJ setelah kegiatan pendampingan berlangsung. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan kemampuan peserta menyusun RAB kegiatan Karang Taruna secara mandiri dan kemampuan peserta menyusun LPJ keuangan kegiatan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan Kegiatan Karang Taruna” dilaksanakan pada Jumat, 31 Juli 2026, pukul 19.00–21.30 WIB, bertempat di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Kegiatan diikuti oleh 10 orang pengurus inti Karang Taruna Kelurahan Balongsari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan kegiatan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas tersebut relevan dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang menekankan penguatan tata kelola organisasi kepemudaan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan materi konsep dasar anggaran dan fungsi anggaran bagi organisasi kepemudaan. Secara teoritis, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang membantu organisasi menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan (National Council of Nonprofits, 2024). Dalam konteks Karang Taruna, pemahaman tersebut penting agar penggunaan dana kegiatan didasarkan pada kebutuhan dan tujuan yang jelas, bukan sekadar perkiraan.



Gambar 1. Pembukaan dan Penyampaian Materi Penyusunan Anggaran kepada Pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari

Materi berikutnya membahas tahapan dan format penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Peserta dilatih mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, menentukan volume dan harga satuan, menghitung total biaya, serta mengelompokkan komponen pengeluaran. Penyusunan RAB yang sistematis dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana (Khairunnisa et al., 2025). Kegiatan

kemudian dilanjutkan dengan pengenalan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sederhana.

Pelatihan juga menggunakan perspektif akuntabilitas dan literasi keuangan. Akuntabilitas menuntut pengelola organisasi mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan keuangan dalam pengambilan keputusan (Amirah et al., 2024; Mancone et al., 2024). Oleh karena itu, peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga praktik penyusunan RAB dan laporan keuangan berdasarkan contoh kegiatan Karang Taruna.

Secara keseluruhan, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pengurus mengenai pengelolaan keuangan organisasi. Melalui kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan secara sederhana, pengurus diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas tata kelola Karang Taruna Kelurahan Balongsari.

Pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Setelah penyampaian materi, tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan disertai contoh format sederhana yang dapat digunakan oleh pengurus Karang Taruna. LPJ diposisikan sebagai instrumen akuntabilitas yang menunjukkan sumber penerimaan, penggunaan dana, serta saldo akhir kegiatan secara sistematis. Akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan organisasi non-profit karena dapat memperkuat pengendalian dan kepercayaan pemangku kepentingan (Julaika & Wardhani, 2024). Dengan demikian, peserta diarahkan untuk memahami bahwa LPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya organisasi.

Materi LPJ juga menekankan pentingnya kelengkapan bukti transaksi dan kesesuaian antara anggaran dengan realisasi pengeluaran. Dalam perspektif pengendalian keuangan, pencatatan transaksi yang didukung bukti yang memadai membantu organisasi menelusuri penggunaan dana dan mengevaluasi kesesuaian pengeluaran dengan rencana kegiatan. Nisa dan Widodo (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan dalam praktik pelaporan keuangan organisasi non-profit di Indonesia. Oleh karena itu, pengurus Karang Taruna diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan bukti transaksi, serta penyusunan rekapitulasi sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban keuangan.

Pada sesi inti, tim pelaksana melakukan pendampingan langsung dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menggunakan contoh kegiatan Karang Taruna yang pernah dan akan dilaksanakan. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kegiatan, menentukan volume, mencatat harga satuan, menghitung jumlah setiap komponen, dan merekapitulasi keseluruhan biaya. Pendekatan tersebut menerapkan prinsip *experiential learning*, yaitu pembelajaran melalui pengalaman dan praktik langsung. Pendekatan berbasis pengalaman relevan dalam pendidikan keuangan karena pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman praktis dapat membantu peserta menghubungkan pengetahuan keuangan dengan situasi pengambilan keputusan yang nyata (Mancone et al., 2024).

Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan literasi keuangan pengurus, khususnya kemampuan menerjemahkan kebutuhan kegiatan menjadi perencanaan keuangan yang terukur. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konsep, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Penelitian Senduk et al. (2024) terhadap generasi muda di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dalam konteks kegiatan ini, kemampuan menyusun RAB dan LPJ diharapkan dapat membentuk kebiasaan

pengurus untuk merencanakan pengeluaran sebelum kegiatan, mencatat transaksi secara tertib, dan melakukan evaluasi berdasarkan realisasi penggunaan dana.

Melalui praktik dan pendampingan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai format RAB dan LPJ, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengelola keuangan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Kegiatan ini menghasilkan proses pembelajaran yang menghubungkan perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga pertanggungjawaban keuangan dalam satu siklus pengelolaan. Dengan demikian, pelatihan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengurus Karang Taruna dalam mengelola sumber daya organisasi secara lebih tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Julaika dan Wardhani (2024) bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian keuangan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan organisasi non-profit.



Gambar 2. Pendampingan Langsung Praktik Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Diskusi

Pada sesi berikutnya, peserta didampingi untuk mempraktikkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana, serta bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Praktik ini diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa LPJ merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan, karena pengurus perlu memberikan informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan. Pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi non-profit juga ditunjukkan oleh Nisa dan Widodo (2024), yang menemukan masih adanya permasalahan dalam praktik pelaporan keuangan organisasi non-profit di Indonesia.

Dalam praktik penyusunan LPJ, peserta diarahkan untuk menghubungkan antara rencana kegiatan, anggaran, realisasi penggunaan dana, dan bukti transaksi. Peserta belajar memeriksa

kesesuaian antara jumlah anggaran dengan realisasi serta mengidentifikasi apabila terdapat perbedaan antara keduanya. Proses tersebut memperkenalkan prinsip pengendalian keuangan secara sederhana, sekaligus membantu pengurus memahami bahwa pencatatan keuangan bukan hanya aktivitas administratif, tetapi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

Kegiatan praktik menggunakan pendekatan *experiential learning*, yaitu peserta memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penerapan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini relevan dalam pendidikan keuangan karena pembelajaran yang melibatkan simulasi, aktivitas praktis, dan situasi keuangan nyata dinilai lebih mampu menghubungkan pengetahuan dengan keterampilan pengambilan keputusan (Mancone et al., 2024). Dalam konteks kegiatan ini, peserta tidak hanya mempelajari format LPJ, tetapi secara langsung menggunakannya berdasarkan pengalaman kegiatan Karang Taruna sehingga materi menjadi lebih kontekstual dan mudah diterapkan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara partisipatif. Peserta secara aktif menyampaikan pengalaman dan kendala yang selama ini dihadapi, seperti kesulitan menentukan komponen anggaran, mencatat pengeluaran, mengumpulkan bukti transaksi, maupun menyusun laporan pertanggungjawaban. Diskusi tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata peserta sekaligus memberikan kesempatan kepada tim pelaksana untuk memberikan solusi berdasarkan kondisi organisasi. Pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman nyata dan kebutuhan peserta penting dalam pengembangan literasi keuangan karena materi menjadi lebih relevan dengan situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Saifulloh, Retnaningdyah, & Mustofa, 2025).

Antusiasme peserta dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan menunjukkan bahwa kegiatan tidak berlangsung secara satu arah, melainkan membentuk proses pembelajaran partisipatif antara tim pelaksana dan pengurus Karang Taruna. Masukan peserta selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan contoh, format, dan penjelasan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang sebenarnya dihadapi oleh Karang Taruna Kelurahan Balongsari. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis mengenai penyusunan LPJ, tetapi juga mendorong terbentuknya kemampuan pengurus dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi keuangan kegiatan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Temuan mengenai pentingnya pendidikan keuangan dalam membentuk kemampuan pengelolaan keuangan juga mendukung pendekatan tersebut (Senduk et al., 2024).



Gambar 3. Diskusi dan Praktik Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan

Hasil dan Faktor Pendukung serta Penghambat Kegiatan

Berdasarkan hasil pendampingan dan observasi selama kegiatan berlangsung, pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan anggaran serta laporan keuangan kegiatan. Peserta mampu mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menentukan volume dan harga satuan, serta melakukan rekapitulasi biaya sesuai format yang diberikan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang menggabungkan penyampaian materi dengan praktik langsung dapat membantu peserta menghubungkan pengetahuan konseptual dengan permasalahan pengelolaan keuangan yang mereka hadapi. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman juga dinilai relevan dalam meningkatkan kemampuan literasi keuangan karena peserta memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan melalui situasi yang konkret (Mancone et al., 2024).

Selain kemampuan menyusun RAB, peserta juga menunjukkan kemampuan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan secara lebih sistematis. Peserta mampu memahami hubungan antara rencana anggaran, realisasi pengeluaran, dan bukti transaksi sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban keuangan. Pemahaman mengenai kelengkapan bukti pengeluaran menjadi salah satu capaian penting karena dokumentasi transaksi memungkinkan penggunaan dana ditelusuri dan diverifikasi. Dari perspektif akuntabilitas, praktik tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota organisasi maupun pihak lain yang berkepentingan (Julaika & Wardhani, 2024).

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendampingan langsung menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan transfer pengetahuan dan keterampilan. Peserta dapat menyampaikan persoalan yang pernah mereka alami dan memperoleh penjelasan secara langsung berdasarkan kasus yang relevan dengan kegiatan Karang Taruna. Kondisi tersebut menciptakan proses pembelajaran yang lebih kontekstual dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata. Mancone et al. (2024) menekankan bahwa program literasi keuangan akan lebih bermakna

ketika peserta memperoleh pengalaman praktis yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, metode *learning by doing* yang digunakan dalam kegiatan ini dapat menjadi pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi kepemudaan.

Beberapa faktor pendukung kegiatan meliputi antusiasme dan keterbukaan peserta, dukungan Kelurahan Balongsari dalam menyediakan tempat kegiatan, serta metode pendampingan yang memungkinkan peserta memperoleh bimbingan secara langsung. Partisipasi aktif peserta menjadi modal penting dalam proses peningkatan kapasitas organisasi karena keberhasilan pelatihan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi, tetapi juga oleh keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Selain itu, dukungan kelembagaan dari pihak kelurahan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan dan memperkuat peluang penerapan pengetahuan yang diperoleh setelah pelatihan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat, terutama keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan dan keberagaman latar belakang pendidikan peserta yang menyebabkan tingkat pemahaman tidak sepenuhnya sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengurus memerlukan proses yang berkelanjutan, terutama melalui pendampingan lanjutan dan praktik secara berkala. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya dapat diarahkan pada monitoring dan evaluasi penerapan RAB dan LPJ dalam kegiatan nyata Karang Taruna. Pendekatan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan, meningkatkan konsistensi pencatatan, serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi (Senduk et al., 2024).

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan langsung dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari dalam mengelola anggaran kegiatan. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan, menentukan volume dan harga satuan, menghitung total biaya, serta melakukan rekapitulasi anggaran sesuai format yang diberikan. Penggunaan format RAB yang sistematis, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai panduan praktis penyusunan anggaran, membantu peserta memahami tahapan penganggaran secara lebih terstruktur (Jurnal.id, 2026a, 2026b; OCBC NISP, 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *experiential learning*, bahwa pemahaman akan lebih mudah terbentuk ketika peserta memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan melalui pengalaman langsung (Mancone et al., 2024).

Kemampuan menyusun RAB juga memperkuat fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian kegiatan. Peserta tidak hanya diarahkan untuk menghitung jumlah biaya, tetapi juga memahami hubungan antara tujuan kegiatan, kebutuhan sumber daya, dan alokasi dana. Dengan demikian, anggaran dapat menjadi dasar untuk membandingkan antara rencana dan realisasi serta menjadi bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Prinsip tersebut sesuai dengan pandangan pengelolaan keuangan organisasi non-profit bahwa anggaran diperlukan untuk menghubungkan tujuan program dengan sumber daya yang tersedia serta membantu organisasi melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana (National Council of Nonprofits, 2024). Dalam konteks praktis, penggunaan pencatatan dan pemantauan anggaran juga dapat membantu organisasi mengendalikan pengeluaran dan memperoleh informasi keuangan secara lebih terstruktur (Kledo, 2026).

Kemampuan peserta dalam menyusun LPJ kegiatan juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Peserta memahami bahwa LPJ

harus memuat laporan pelaksanaan kegiatan, rincian penggunaan dana, serta bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Prinsip tersebut sejalan dengan panduan penyusunan LPJ yang menempatkan informasi pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, evaluasi, dan dokumen pendukung sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban (Talenta, 2026). Secara akademik, praktik tersebut memperkuat akuntabilitas karena pengurus dapat menjelaskan bagaimana sumber daya organisasi digunakan dan menyediakan bukti yang dapat diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan (Julaika & Wardhani, 2024). Oleh karena itu, LPJ tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan pengendalian organisasi.

Penguasaan penyusunan RAB dan LPJ selanjutnya dapat dipandang sebagai bagian dari peningkatan literasi keuangan dan kapasitas organisasi. Pengurus yang mampu merencanakan kebutuhan, menentukan prioritas pengeluaran, mencatat transaksi, dan menyusun pertanggungjawaban memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya organisasi. Hal tersebut sejalan dengan Mancone et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya pembelajaran keuangan yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik dan perilaku pengelolaan keuangan. Senduk et al. (2024) juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan dalam membentuk kemampuan pengelolaan keuangan pada generasi muda. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya menghasilkan kemampuan teknis, tetapi juga berpotensi membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Sebagai organisasi kepemudaan berbasis masyarakat, kemampuan pengurus Karang Taruna dalam mengelola keuangan merupakan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan tanggung jawab sosial organisasi. Karang Taruna tidak hanya dituntut mampu menyelenggarakan kegiatan sosial dan kepemudaan, tetapi juga perlu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota, masyarakat, dan pihak pendukung kegiatan. Dalam konteks tersebut, pendampingan perguruan tinggi dapat menjadi sarana transfer pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas organisasi di tingkat kelurahan. Pandangan mengenai pentingnya pengelolaan organisasi kepemudaan yang tertib juga telah dikemukakan dalam berbagai kajian dan pedoman kelembagaan Karang Taruna (Dinas Sosial Kota Magelang, 2022). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi model pendampingan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi kepemudaan.

SIMPULAN

Pelatihan penyusunan anggaran dan laporan keuangan kegiatan Karang Taruna Kelurahan Balongsari telah terlaksana dengan baik pada 31 Juli 2026 dan diikuti oleh 10 orang pengurus inti Karang Taruna. Melalui metode pendampingan langsung dan diskusi, pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari mampu menyusun RAB kegiatan sesuai format yang diajarkan dan memiliki kemampuan untuk menyusun LPJ kegiatan secara sistematis dan akuntabel.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung yang disertai praktik dan diskusi terbuka efektif dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan kegiatan pada organisasi kepemudaan berbasis kelurahan. Pengurus Karang Taruna Kelurahan Balongsari disarankan menerapkan format RAB dan LPJ yang telah dipelajari pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan berikutnya, serta perlu diselenggarakan pendampingan lanjutan secara berkala agar kemampuan pengelolaan keuangan kegiatan pengurus semakin terasah. Pihak Kelurahan Balongsari juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan penerapan tertib administrasi keuangan pada kegiatan-kegiatan Karang Taruna di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate.id. (2025). Pengertian lengkap tentang laporan pertanggungjawaban. Diakses dari <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-laporan-pertanggungjawaban/>
- Desa Tusan. (2024). Karang Taruna: pengertian, tugas pokok dan fungsi. Diakses dari <https://tusan.desa.id/artikel/2024/5/13/karang-taruna-pengertian-tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Dinas Sosial Kota Magelang. (2022). Tugas dan fungsi Karang Taruna sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Diakses dari <https://dinsos.magelangkota.go.id/tugas-dan-fungsi-karang-taruna-sebagai-potensi-sumber-kesejahteraan-sosial/>
- Jobstreet Indonesia. (2026). Contoh RAB dan cara membuatnya (gratis template). Diakses dari <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/contoh-rab-cara-membuat-template>
- Julaika, J., & Wardhani, N. K. (2024). The accountability vs transparency: Who is in control in the financial management of nonprofit institutions? *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3). <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5723>
- Jurnal.id. (2026). Pengertian dan contoh rencana anggaran biaya (RAB). Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-rencana-anggaran-biaya-sbc/>
- Jurnal.id. (2026). Cara membuat RAB kegiatan organisasi serta contohnya. Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-rab-kegiatan-organisasi-sbc/>
- Kelurahan Jakarta. (t.t.). Karang Taruna. Diakses dari <https://www.jakarta.go.id/karang-taruna>
- Kledo. (2026). Laporan pertanggungjawaban, begini cara membuatnya. Diakses dari <https://kledo.com/blog/laporan-pertanggungjawaban/>
- Kudkab Empat Lawang. (2026). Laporan pertanggungjawaban kegiatan: format, isi, panduan. Diakses dari <https://kudkabempatlawang.org/laporan-pertanggungjawaban-kegiatan/>
- Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., Spica, G., Zanon, A., & Diotaiuti, P. (2024). Youth, money, and behavior: The impact of financial literacy programs. *Frontiers in Education*, 9, 1397060. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1397060>
- National Council of Nonprofits. (2024). Budgeting for nonprofits. National Council of Nonprofits.
- OCBC NISP. (2023). Rencana anggaran biaya (RAB): pengertian, contoh, dan cara buat. Diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/07/24/rencana-anggaran-biaya>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Diakses dari <https://www.panggungharjo.desa.id/wp->

content/uploads/2018/03/PERMENSOS-No.-77-Tahun-2010-tentang-Pedoman-Dasar-Karang-Taruna.pdf

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Senduk, F. F. W., Djatmika, E. T., Wahyono, H., Churiyah, M., Mahasneh, O., & Arjanto, P. (2024). Fostering financially savvy generations: The intersection of financial education, digital financial misconception and parental wellbeing. *Frontiers in Education*, 9, 1460374. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1460374>

Saifulloh, A. I., Retnaningdyah, P., & Mustofa, A. (2025). Immersive Situated Practice Within a Local Curriculum for Hybrid Learning. *Veredas Do Diretio*, 2–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n5.3587>

Talenta. (2026). Apa itu laporan pertanggungjawaban (LPJ)? Tujuan, prinsip, format. Diakses dari <https://www.talenta.co/blog/laporan-pertanggungjawaban/>